

PERAN GEREJA DALAM PENDIDIKAN POLITIK: SOSIALISASI POLITIK PADA GENERASI Z GPIB MARKUS DALAM PEMILU PRESIDEN 2024

Hendry Christian Pokaton, Haryo Ksatrio Utomo, dan Pangi Syarwi

Universitas Bung Karno, Jakarta

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

haryo.ksatrio.utomo@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan bagian penting dalam pembentukan warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Institusi keagamaan, termasuk gereja, memiliki posisi strategis sebagai salah satu agen sosialisasi politik yang dapat membentuk orientasi, sikap, dan kesadaran politik jemaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Markus dalam pendidikan politik bagi Generasi Z menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024. Fokus penelitian meliputi peran gereja dalam menjaga netralitas politik, sosialisasi penolakan terhadap politik uang, serta membangun kesadaran partisipasi politik Generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan gereja, ketua pemuda, dan jemaat Generasi Z, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori sosialisasi politik Almond dan Verba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPIB Markus berperan sebagai agen sosialisasi politik sekunder melalui kegiatan pembinaan, seminar, diskusi, katekisasi, dan penyampaian nilai-nilai Kristiani. GPIB Markus menjaga netralitas politik dengan tidak memberikan dukungan kepada partai politik maupun pasangan calon tertentu, tetapi tetap mendorong jemaat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Sosialisasi anti politik uang dilakukan melalui penanaman nilai kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pendidikan politik juga mendorong Generasi Z untuk lebih kritis terhadap informasi politik serta lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.

Kata Kunci: Gereja, Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Generasi Z, Netralitas Politik, Politik Uang.

ABSTRACT

Political education is an important aspect in developing critical, participatory, and responsible citizens. Religious institutions, including churches, hold a strategic position as political socialization agents that can shape the political orientation, attitudes, and awareness of their members. This study aims to analyze the role of the Indonesian Protestant Church in the Western Part (GPIB) Markus in providing political education for Generation Z in the context of the 2024 Presidential Election. The research focuses on the church's role in maintaining political neutrality, socializing the rejection of money politics, and building political participation awareness among Generation Z. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with church leaders, youth leaders, and Generation Z congregation members, supported by observation and documentation. The data were analyzed descriptively-analytically using Almond and Verba's theory of political socialization. The findings indicate that GPIB Markus functions as a secondary agent of political socialization through youth development, seminars, discussions, catechism, and the transmission of Christian values. GPIB Markus maintains political neutrality by refraining from supporting particular political parties or presidential

candidates while encouraging congregation members to exercise their voting rights responsibly. Anti-money politics socialization is carried out through the promotion of honesty, integrity, justice, and moral responsibility. Political education also encourages Generation Z to become more critical toward political information and more aware of the importance of participating in elections.

Keywords: Church, Political Education, Political Socialization, Generation Z, Political Neutrality, Money Politics.

PENDAHULUAN

Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan publik, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap kritis, serta kesadaran untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem politik.

Generasi Z merupakan kelompok yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital (digital natives), Generasi Z memiliki akses yang luas terhadap informasi politik. Di sisi lain, kemudahan memperoleh informasi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, polarisasi, dan narasi politik yang provokatif (Prensky, 2001; Evita, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran berbagai agen sosialisasi politik yang dapat membantu Generasi Z memahami politik secara kritis dan bertanggung jawab.

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap, orientasi, dan perilaku politik individu. Dalam pandangan Almond dan Verba (1963), proses tersebut dapat berlangsung melalui berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa, organisasi sosial, dan institusi keagamaan. Gereja dalam konteks ini dapat menjalankan peran sebagai agen sosialisasi politik sekunder melalui penyampaian nilai moral, pembinaan, diskusi, seminar, katekisasi, khotbah, dan berbagai aktivitas komunitas.

Gereja tidak harus terlibat dalam politik praktis untuk menjalankan pendidikan politik. Sebaliknya, gereja dapat memberikan pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, pentingnya penggunaan hak pilih, etika politik, serta penolakan terhadap praktik politik uang. Dengan demikian, netralitas politik gereja tidak berarti sikap apatis terhadap kehidupan demokrasi (Widjaja, 2016; Malino et al., 2024).

GPIB Markus, Jakarta Selatan, menjadi salah satu institusi keagamaan yang menjalankan pembinaan terhadap jemaat, termasuk kelompok pemuda dan Generasi Z. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana GPIB Markus melakukan sosialisasi politik kepada Generasi Z dalam menghadapi Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menempatkan GPIB Markus sebagai lokus penelitian, Generasi Z sebagai subjek penelitian, dan sosialisasi politik sebagai fokus utama. Kajian sebelumnya banyak membahas peran gereja dalam kehidupan politik secara umum, etika politik, dan pendidikan politik jemaat (Gulo et al., 2024; Hohakay et al., 2024; Odi,

2023). Namun, penelitian ini secara khusus melihat hubungan antara pendidikan politik gereja, netralitas politik, penolakan politik uang, dan kesadaran partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu Presiden 2024.

KAJIAN TEORITIS: SOSIALISASI POLITIK

Sosialisasi politik menjelaskan proses ketika individu memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan orientasi terhadap kehidupan politik. Proses tersebut tidak terjadi hanya melalui satu institusi, tetapi melalui berbagai lingkungan yang berinteraksi sepanjang kehidupan individu (Almond & Verba, 1963).

Kerangka Almond dan Verba digunakan untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dapat membentuk orientasi politik kognitif, afektif, dan evaluatif. Keluarga, sekolah, kelompok sosial, media, organisasi, dan institusi keagamaan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pemahaman politik seseorang.

Dalam penelitian ini, GPIB Markus ditempatkan sebagai agen sosialisasi politik sekunder. Peran tersebut terlihat ketika kegiatan pembinaan dan interaksi komunitas memberi ruang bagi Generasi Z untuk memahami hak politik, tanggung jawab warga negara, dan nilai yang berkaitan dengan demokrasi.

Pendekatan ini tidak menganggap setiap pesan gereja otomatis menentukan pilihan politik jemaat. Sosialisasi dipahami sebagai proses pembentukan orientasi yang tetap melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik.

Gereja sebagai bagian dari civil society memiliki keunggulan sebagai ruang komunitas karena terdapat interaksi antargenerasi dan hubungan yang relatif berkelanjutan. Pendeta, pengurus, pemuda, dan anggota jemaat dapat terlibat dalam proses penyampaian nilai dan pertukaran pandangan mengenai persoalan sosial-politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Yin, 2011). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pemahaman, serta proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam lingkungan GPIB Markus.

Lokasi penelitian berada di GPIB Markus, Jakarta Selatan. Subjek penelitian terdiri atas pimpinan gereja (pendeta), ketua pemuda (Gerakan Pemuda), dan jemaat Generasi Z yang menjadi pemilih pemula atau pemilih muda pada Pemilu 2024. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria keterlibatan dalam kegiatan pembinaan gereja dan rentang usia Generasi Z (18-27 tahun).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi kegiatan gereja dan studi kepustakaan. Pengumpulan data juga didukung melalui observasi partisipatif pada kegiatan pembinaan, ibadah, dan diskusi pemuda.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis penelitian menggunakan teori sosialisasi politik Almond dan Verba (1963). Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan peran GPIB Markus sebagai agen sosialisasi politik sekunder dalam membentuk orientasi politik, kesadaran demokrasi, dan partisipasi politik Generasi Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GPIB Markus sebagai Agen Sosialisasi Politik Sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPIB Markus berperan sebagai agen sosialisasi politik sekunder bagi Generasi Z. Peran tersebut tidak dilakukan dalam bentuk pengarahan untuk mendukung kekuatan politik tertentu, tetapi melalui pendidikan nilai dan pembinaan kesadaran sebagai warga negara.

Sosialisasi politik dilakukan melalui kegiatan pembinaan pemuda (Gerakan Pemuda), seminar kebangsaan, diskusi tematik, katekisasi, khotbah yang mengaitkan iman dengan tanggung jawab kewarganegaraan, dan interaksi antara pemuda dengan pendeta maupun pengurus gereja. Dalam proses tersebut, nilai-nilai Kristiani dihubungkan dengan nilai demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

Berdasarkan teori Almond dan Verba, GPIB Markus dapat dipahami sebagai lingkungan sosial yang membantu Generasi Z membentuk pemahaman dan orientasi terhadap kehidupan politik. Gereja menjadi ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, nilai, dan pandangan mengenai persoalan sosial serta politik tanpa menghilangkan otonomi jemaat dalam menentukan pilihan politik.

2. Netralitas Politik GPIB Markus

Netralitas politik merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan pendidikan politik di GPIB Markus. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak mengarahkan jemaat untuk memilih partai politik atau calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Netralitas tersebut tidak berarti bahwa gereja menjauh dari persoalan demokrasi. GPIB Markus tetap mendorong jemaat untuk menggunakan hak pilih serta terlibat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan politik dilakukan dengan menekankan nilai dan etika, bukan dengan memberikan instruksi mengenai pilihan politik. Sikap tersebut memungkinkan gereja menjadi ruang yang terbuka bagi jemaat yang memiliki pilihan politik berbeda.

Dengan demikian, netralitas politik GPIB Markus dapat dipahami sebagai keberpihakan kepada nilai demokrasi dan kepentingan bersama, bukan keberpihakan kepada kekuatan politik praktis tertentu. Hal ini sekaligus menjaga persatuan jemaat di tengah perbedaan pilihan politik.

3. Sosialisasi Penolakan terhadap Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu persoalan yang dapat merusak kualitas demokrasi karena dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks tersebut, GPIB Markus melakukan sosialisasi penolakan terhadap politik uang melalui pendekatan moral dan keagamaan.

Nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama menjadi bagian dari pembinaan jemaat. Generasi Z didorong untuk memahami bahwa penggunaan hak pilih tidak seharusnya dipengaruhi oleh pemberian uang atau bentuk keuntungan material tertentu.

Pendidikan politik yang diberikan gereja membantu memperkuat kesadaran bahwa pilihan politik harus didasarkan pada pertimbangan rasional, nilai moral, dan hati nurani. Sosialisasi anti politik uang juga menunjukkan bahwa gereja memiliki fungsi sebagai institusi civil society yang berkontribusi dalam membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z yang diwawancarai memiliki pemahaman mengenai bahaya politik uang. Pendidikan politik gereja menjadi salah satu faktor yang memperkuat sikap kritis tersebut, meskipun pengaruh lingkungan keluarga dan media tetap relevan.

4. Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Generasi Z

Salah satu tujuan pendidikan politik GPIB Markus adalah membangun kesadaran Generasi Z mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi politik dipahami tidak hanya sebagai kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga sebagai kemampuan memahami isu politik, menyaring informasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan dan diskusi membantu Generasi Z untuk lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih. Pendidikan politik yang diberikan tidak memaksakan pilihan politik tertentu, tetapi mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan berdasarkan informasi yang diperoleh secara kritis dan komprehensif.

Sebagian responden menunjukkan perubahan orientasi politik dari sikap yang sebelumnya cenderung apatis menjadi lebih sadar mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Perubahan tersebut terlihat dalam meningkatnya perhatian terhadap informasi politik dan kesadaran bahwa suara individu memiliki pengaruh terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diskusi dan pembinaan memberi ruang bagi pemuda untuk bertanya dan mempertimbangkan persoalan politik secara terbuka. Kebebasan dalam menentukan pilihan tetap dijaga, sementara kesadaran untuk menggunakan hak politik terus dikuatkan. Dalam konteks ini, gereja berperan sebagai lingkungan yang memberikan penguatan nilai dan orientasi, bukan sebagai lembaga yang mengendalikan keputusan politik individu.

5. Tantangan Era Digital

Tantangan utama dalam pendidikan politik Generasi Z adalah kuatnya pengaruh media sosial dan arus informasi digital. Generasi Z memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, tetapi tidak semua informasi memiliki tingkat kredibilitas yang baik. Polarisasi politik, hoaks, disinformasi, dan narasi provokatif dapat memengaruhi cara Generasi Z memahami persoalan politik (Arifin, 2024; Evita, 2023).

Oleh karena itu, pendidikan politik gereja tidak hanya berkaitan dengan partisipasi pemilu, tetapi juga dengan pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis (*critical thinking*) terhadap informasi yang diterima. GPIB Markus merespons kondisi tersebut melalui penanaman nilai dan pembinaan yang mendorong jemaat untuk menggunakan pertimbangan rasional serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Dialog antara pemuda, pendeta, dan pengurus gereja juga menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi. Pembinaan nilai dan dialog komunitas dapat membantu Generasi Z untuk tidak langsung menerima setiap informasi yang beredar di media sosial. Kemampuan mempertimbangkan, memverifikasi, dan mengklarifikasi informasi menjadi bagian dari pembentukan kesadaran politik.

Tantangan lain adalah menjaga pendidikan politik agar tidak berubah menjadi indoktrinasi. Batas antara pendidikan nilai dan pengarahan pilihan politik harus tetap dijaga agar prinsip kebebasan hati nurani jemaat tetap dihormati.

6. Analisis: Netralitas Bukan Apatisme

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa netralitas dan apatisme merupakan dua hal yang berbeda. Netralitas berkaitan dengan posisi institusional yang tidak mendukung kandidat tertentu, sedangkan apatisme menunjukkan ketidakpedulian terhadap kehidupan politik.

GPIB Markus mengambil posisi netral secara institusional, tetapi tetap memberikan perhatian terhadap pentingnya partisipasi demokratis. Gereja mendorong jemaat untuk menggunakan hak pilih dan menolak praktik yang merusak kualitas pemilu, seperti politik uang dan penyebaran hoaks.

Posisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan konstruktif. Gereja tidak masuk ke kompetisi politik praktis, tetapi ikut memperkuat kualitas warga yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Pendekatan ini juga memberi perlindungan terhadap keberagaman pilihan politik di dalam komunitas gereja dan mencegah perpecahan internal akibat politik elektoral.

7. Analisis: Gereja sebagai Bagian dari Civil Society

Sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*), gereja dapat berkontribusi pada kehidupan demokrasi melalui pembentukan kesadaran warga. Peran tersebut berbeda dengan fungsi lembaga negara atau partai politik, karena gereja lebih menekankan pada pembentukan karakter dan nilai warga negara.

Kontribusi GPIB Markus terlihat pada penanaman nilai dan penguatan tanggung jawab warga. Gereja menjadi ruang pembinaan yang dapat membantu Generasi Z memahami hubungan antara nilai moral, iman Kristiani, dan kehidupan publik. Keberadaan ruang komunitas juga penting karena Generasi Z tidak hanya belajar dari media digital. Dialog langsung dengan pendeta, pengurus, dan kelompok sebaya memberi kesempatan untuk bertukar pandangan dan mengklarifikasi informasi politik.

Dengan demikian, sosialisasi politik yang berlangsung di GPIB Markus memperlihatkan kontribusi institusi keagamaan terhadap pembentukan budaya politik partisipan yang lebih bertanggung jawab, kritis, dan berintegritas, sesuai dengan konsep budaya politik dalam teori Almond dan Verba.

Tabel 1. Kerangka Sosialisasi Politik GPIB Markus

Dimensi	Bentuk Kegiatan	Nilai yang Ditanamkan	Capaian pada Gen Z
Netralitas Politik	Khutbah, pembinaan, diskusi	Keadilan, persatuan, penghargaan terhadap perbedaan	Memahami netralitas bukan apatisme
Anti Politik Uang	Seminar, katekisasi, pembinaan pemuda	Kejujuran, integritas, tanggung jawab moral	Menolak politik uang
Partisipasi Politik	Gerakan Pemuda, dialog intergenerasi	Kepedulian sosial, tanggung jawab warga negara	Kesadaran menggunakan hak pilih
Literasi Digital	Diskusi kritis, klarifikasi informasi	Berpikir kritis, kehati-hatian informasi	Kritis terhadap hoaks & polarisasi

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa GPIB Markus berperan aktif sebagai agen sosialisasi politik sekunder bagi Generasi Z menjelang Pemilu Presiden 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan, diskusi, seminar, katekisasi, khotbah, dan interaksi komunitas yang menghubungkan nilai Kristiani dengan pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan.

GPIB Markus menjaga netralitas politik dengan tidak memberikan dukungan kepada partai politik maupun pasangan calon tertentu. Namun, gereja tetap mendorong penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab. Netralitas dengan demikian tidak dimaknai sebagai sikap apatis terhadap kehidupan demokrasi, tetapi sebagai komitmen untuk membangun kesadaran politik jemaat agar mampu menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab.

Sosialisasi penolakan terhadap politik uang dilakukan melalui penanaman nilai kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pendidikan politik yang dilakukan gereja membantu Generasi Z memahami dampak negatif politik uang terhadap kebebasan dan kualitas demokrasi.

GPIB Markus juga berperan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi politik Generasi Z. Pendidikan politik mendorong pemuda untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta bersikap lebih kritis terhadap informasi politik di era digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa gereja dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap demokrasi tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Implikasinya, pendidikan politik berbasis komunitas keagamaan dapat menjadi pelengkap bagi pendidikan politik formal, khususnya bagi Generasi Z di era digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar gereja atau antar komunitas keagamaan serta mengkaji pengaruh jangka panjang sosialisasi politik gereja terhadap perilaku politik Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqy, M. (2025). Penilaian dan partisipasi politik Generasi Z dalam pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2024. *Jurnal EMPATI*, 14(1).
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Arifin. (2024). Berita politik dan sikap politik Generasi Z pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. *Comdent: Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 3(2).
- Evita, N. (2023). Generasi Z dalam pemilu: Pola bermedia Generasi Z dalam pencarian informasi politik. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66.
- Gulo, J. M., Halawa, A., & Bambang, M. (2024). Peran gereja dalam pemerintahan: Sejarah tentang agama Kristen. *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, 2(1), 145–158.
- Hohakay, K. O., Itje, T., May, O. J. S., & Ice, D. (2024). Peran Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam pendidikan politik bagi anggota jemaat. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 6(1), 27–40.
- Malino, Y., Supratikno, A., & Ludji, I. (2024). Agama dan etika politik: Peran gereja dalam diskursus etika politik era reformasi. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 9(2), 684–705.
- Odi, M. (2023). Peran gereja dalam mempersiapkan umat Katolik menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024. *Jurnal Magistra*, 1(4), 47–56.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Widjaja, F. I. (2016). Peran gereja terhadap kehidupan politik di wilayah Kepulauan Riau. *Real Didache*, 1(2), 117–140.
- Yin, R. K. (2011). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.